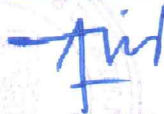




REGISTER RISIKO TAHUN 2026

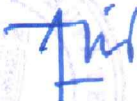
**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PETANAHAN**

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Nama Pemda	:	Pemerintah Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah
Tahun Penilaian	:	2025
Periode yang dinilai	:	Periode RPJMD Tahun 2025-2029
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Kewilayahan
OPD yang Dinilai	:	Kecamatan Petanahan
Sumber Data	Renstra Kecamatan Petanahan Tahun 2025-2029	
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Petanahan	
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Petanahan	
IKU Renstra OPD	IKU	
	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Petanahan
		Target 90,40
Program	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
	2	Program Penyelenggaraan Pemerintah daerah Pelayanan Publik
	3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
	4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Tujuan, Sasaran, IKU, dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Petanahan Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kecamatan Petanahan IKU Strategis: Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Petanahan Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
Petanahan, 27 November 2025 Camat Petanahan  (Aris Yunanto, S.IP.,M.Si.) Pembina Tingkat I/IV.b NIP : 19690927 198911 1 001		

Sekretaris		
Kasi / Kasubag		

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Kewilayahan		
OPD yang Dinilai	: Kecamatan Petanahan		
Sumber Data	Renja 2026		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Petanahan		
Program Kecamatan Petanahan (Renja 2026) dan Kegiatan Utama	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
	1.1. Perencanaan, Penanganan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	2 Program Penyelenggaraan Pemerintah daerah Pelayanan Publik		
	2.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
	3 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
	3.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
	4 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
	4.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
	Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan
1		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Petanahan)	70.03
		1.1 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat	11 dokumen
		1.2 Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan
		1.3 Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat	12 bulan
		1.4 Jumlah unit pengadaan Barang Milik Daerah	12 unit
		1.5 Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	12 bulan
		1.6 Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah	18 unit
2		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Petanahan)	100%
		2.1 Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%
3		Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Petanahan)	100
		3.1 Jumlah Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%
4		Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Petanahan)	100%
		4.1 Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	100%
Program, Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
	Kegiatan:		
	1 Perencanaan, Penanganan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Keluaran/Hasil Kegiatan		
	1 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (11 Dokumen)		
	2 Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (12 Bulan)		
	4 Jumlah unit pengadaan Barang Milik Daerah (12 Unit)		
Petanahan, 27 November 2025			
Camat Petanahan			
			
(Aris Yunanto, S.IP., M.Si.)			
Pembina Tingkat I/IV.b			
NIP : 19690927 198911 1 001			

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris		
Kasi/Kasubag		

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

: Pemerintah Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah											
: Kecamatan Petanahan											
: 2025											
: Periode RPJMD Tahun 2025-2029											
: Unsur Kewilayahan											
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Pemilik	Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Uraian		Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
Tujuan Strategis Pemda 4: Mengimplementasikan reformasi birokrasi di seluruh bidang pembangunan		Indeks Reformasi Birokrasi	Tidak tercapainya nilai Indeks Reformasi Birokrasi sesuai target nasional	RSP.26.35.04.01	Kepala Daerah	Kurangnya komitmen dan konsistensi pelaksanaan program RB di Pemda	Internal	UC	Penurunan kinerja Pemda, rendahnya kepercayaan publik, dan hambatan dalam pencapaian target pembangunan	Pemda, masyarakat, perangkat daerah	
			Gangguan keamanan siber pada sistem layanan publik	RSP.26.35.19.02	Kepala Daerah	Sistem keamanan TI lemah, kurangnya update aplikasi, dan rendahnya awareness keamanan data	Internal-Eksternal	UC	Kebocoran data, berhentinya layanan publik digital, dan menurunnya kepercayaan masyarakat	Masyarakat, perangkat daerah, Pemda	
Sasaran 4.3: Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis IT		Indeks Pelayanan Publik	Layanan publik berbasis IT tidak berjalan optimal	RSP.26.35.19.03	Kepala Daerah	Infrastruktur TI belum memadai, SDM tidak kompeten, dan rendahnya integrasi sistem antar unit	Internal-Eksternal	C	Menurunnya kualitas pelayanan publik, keluhan masyarakat meningkat, dan penurunan nilai Indeks Pelayanan Publik	Masyarakat, perangkat daerah penyelenggara layanan	

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan *Material*

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Penda : Pemerintah Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah											
Nama OPD : Kecamatan Petanahan											
Tahun Penilaian : 2025											
Periode yang dinilai : Periode Rensra (Tahun 2025-2029)											
Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Petanahan											
Urutan Pemerintahan : Unsur Kewilayahan											
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Pemilik	Sebab		C/UC	Dampak		Pihak yang Terkena
			Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	Tujuan: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Petanahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Petanahan	Waktu pelayanan terlalu lama sehingga menurunkan kepuasan masyarakat	RSC.25.1 2.19.01	Kecamatan Petanahan	Prosedur pelayanan belum optimal, kurangnya SDM front office	Internal	C	Penurunan nilai IKM, meningkatnya keluhan warga	Masyarakat, Kecamatan	
			Data administrasi kependudukan tidak valid atau tidak terbaru	RSC.25.1 2.19.02	Kecamatan Petanahan	Kurangnya pengawasan verifikasi data, sistem manual belum terintegrasi	Internal	C	Kesalahan pemberian dokumen, proses layanan menjadi lambat	Masyarakat, perangkat kecamatan	
			Gangguan atau kerusakan peralatan IT (komputer, jaringan internet)	RSC.25.1 6.19.03	Kecamatan Petanahan / IT Support	Infrastruktur IT tidak memadai, jaringan internet tidak stabil	Eksternal-Internal	UC	Pelayanan terganggu sementara, antrian menumpuk, keluhan meningkat	Pegawai kecamatan, masyarakat	
	Sasaran Strategis OPD: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kecamatan Petanahan	Meningkatnya kualitas tata kelola kecamatan	Kurangnya kompetensi pegawai dalam penggunaan aplikasi pelayanan	RSC.25.3 8.19.04	Kecamatan Petanahan	Minimnya pelatihan, kurangnya pembinaan teknis	Internal	C	Pelayanan tidak konsisten, proses administrasi menjadi lambat	Pegawai kecamatan, masyarakat	
			Tingginya volume permohonan layanan administrasi tertentu pada waktu tertentu	RSC.25.1 2.19.05	Kecamatan Petanahan	Tren musiman (penerimaan sekolah, perpindahan penduduk), kurangnya prediksi beban kerja	Eksternal	UC	Penumpukan layanan, waktu tunggu meningkat, nilai IKM turun	Masyarakat	
			Koordinasi yang lemah antara Kecamatan dan Desa	RSC.25.1 3.19.01	Kecamatan Petanahan	Kurangnya komunikasi rutin, tidak adanya standar koordinasi	Eksternal-Internal	C	Program pelayanan tidak sinkron, lambatnya tindak lanjut aduan masyarakat	Desa/keurahan, kecamatan	

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan kode risiko

Kolom f diisi dengan pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah											
Nama OPD : Kecamatan Petanahan											
Tahun Penilaian : 2025											
Periode yang dinilai : 2025											
Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Petanahan											
Sasaran strategis OPD : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kecamatan Petanahan											
Urusan Pemerintahan : Urusan Kewilayahan											
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Pemilik	Sebab ¹⁾		C/UC	Dampak ²⁾	
			Takap	Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian	Plak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan	Dokumen perencanaan terlambat disusun sehingga tidak sesuai dengan jadwal perencanaan daerah	RSO.26.3 6.99.01	Kepala OPD, Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Pengumpulan data lama, koordinasi antarpihak tidak efektif	Internal	C	Keterlambatan penetapan perencanaan realisasi anggaran, menurunnya kualitas dokumen perencanaan	Perangkat Daerah
				Data pendukung perencanaan kurang memadai	RSO.26.3 6.99.02	Kepala OPD, Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Data tidak terintegrasi dengan baik	Internal	C	Dokumen perencanaan tidak tepat sasaran, potensi kurang tepatnya alokasi anggaran	Masyarakat, perangkat daerah
				Pelaksanaan evaluasi belum optimal	RSO.26.3 6.99.03	Kepala OPD, Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Kurangnya bukti dukung evaluasi	Internal	C	Keputusan tindak lanjut menjadi tidak tepat	Pimpinan daerah, perangkat daerah
				Keterlambatan penyampaian laporan evaluasi kinerja kepada pihak terkait	RSO.26.3 6.99.04	Kepala OPD, Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Beban kerja tinggi, sistim pelaporan belum optimal	Internal	C	OPD belum memiliki dasar evaluasi tepat waktu, pengambilan kebijakan menjadi terhambat	Perangkat daerah
				Perubahan regulasi perencanaan/evaluasi yang tiba-tiba sehingga mempengaruhi kesesuaian dokumen	RSO.26.3 6.99.05	Kepala OPD, Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Regulasi, baik nasional/daerah berubah mendadak	Eksternal	UC	Revisi dokumen, potensi keterlambatan perencanaan/evaluasi	Perangkat daerah
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perencanaan dan Pengelolaan	Keterlambatan penyusunan dokumen administrasi keuangan	RSO.26.3 7.99.06	Bendahara, perencana	Beban kerja tinggi	Internal	C	Adanya tagihan atas keterlambatan dokumen, reputasi OPD menurun	Perangkat daerah
				Kurang lengkapnya data pendukung	RSO.26.3 7.99.07	Bendahara, Pengeluaran, verifikasi	Verifikasi kurang teliti, ketidakaturan dokumen	Internal	C	Potensi temuan audit, koreksi berkala, reputasi OPD menurun	Perangkat Daerah
				Gangguan aplikasi keuangan (SIPD)	RSO.26.3 7.99.08	Bendahara, perencana	Gangguan server, jaringan internet tidak stabil	Eksternal -Internal	UC	Administrasi keuangan terlunda, proses perencanaan dan penatausahaan terhambat	Perangkat Daerah
				Keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan	RSO.26.3 7.99.09	Bendahara / PPJK	Kurangnya koordinasi, jadwal pelaporan padat	Internal	C	Keterlambatan realisasi anggaran, administrasi terlunda	Perangkat Daerah, Pemda

3	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan Barang Milik Daerah	Perencanaan	Spesifikasi kebutuhan barang tidak sesuai dengan kebutuhan OPD	RSO.26.9 9.99.10	PPTK, Pejabat Pengadaan	Analisis kebutuhan kurang tepat, koordinasi kurang	Internal	C	Barang tidak dapat dimanfaatkan optimal, pemborosan anggaran	Perangkat Daerah pengguna
			Pelaksanaan	Keterlambatan proses pengadaan barang	RSO.26.9 9.99.11	PPTK / Pelaksanaan Kegiatan	Proses tender lambat, penyedia tidak disiplin	Eksternal -Internal	UC	Barang tidak tersedia tepat waktu, menghambat operasional OPD	Perangkat Daerah, masyarakat
			Penyerahan & Pemeriksaan	Kualitas barang tidak sesuai spesifikasi kontrak	RSO.26.9 9.99.12	PPTK / Pelaksanaan Kegiatan	Pengawasan kurang, penyedia tidak memenuhi standar	Eksternal	C	Barang cepat rusak, tidak dapat digunakan, kerugian daerah	Perangkat Daerah

Kolom a diisi dengan nomor urut.

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD

Kolom c diisi dengan indikator kinerja/ tujuan/ sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine, dan Material*

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang mendenita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah			
Tahun Penilaian		: 2025			
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Petanahan			
Urusan Pemerintahan		: Urusan Kewilayahan			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis				
1	Tidak tercapainya nilai Indeks Reformasi Birokrasi sesuai target nasional	RSP.26.35.04.01	3	2	6
2	Gangguan keamanan siber pada sistem layanan publik	RSP.26.35.19.02	5	1	5
3	Layanan publik berbasis IT tidak berjalan optimal	RSP.26.35.19.03	5	3	15
II	Risiko Strategis Perangkat Daerah: Kecamatan Petanahan				
1	Waktu pelayanan terlalu lama sehingga menurunkan kepuasan masyarakat	RSO.26.12.19.01	2	2	4
2	Data administrasi kependudukan tidak valid atau tidak terbaru	RSO.26.12.19.02	2	2	4
3	Gangguan atau kerusakan peralatan IT (komputer, jaringan internet)	RSO.26.16.19.03	4	3	12
4	Kurangnya kompetensi pegawai dalam penggunaan aplikasi pelayanan	RSO.26.38.19.04	3	3	9
5	Tingginya volume permohonan layanan administrasi tertentu pada waktu tertentu	RSO.26.12.19.05	3	3	9
6	Koordinasi yang lemah antara Kecamatan dan Desa	RSO.26.13.19.01	3	2	6
III	Risiko Operasional Perangkat Daerah: Kecamatan Petanahan				
1	Dokumen perencanaan terlambat disusun sehingga tidak sesuai dengan jadwal perencanaan daerah	RSO.26.36.99.01	4	3	12
2	Data pendukung perencanaan kurang memadai	RSO.26.36.99.02	3	3	9
3	Pelaksanaan evaluasi belum optimal	RSO.26.36.99.03	4	3	12
4	Keterlambatan penyampaian laporan evaluasi kinerja kepada pihak terkait	RSO.26.36.99.04	3	3	9
5	Perubahan regulasi perencanaan/evaluasi yang tiba-tiba sehingga mempengaruhi kesesuaian dokumen	RSO.26.36.99.05	4	4	16
6	Keterlambatan penyusunan dokumen administrasi keuangan	RSO.26.37.99.06	3	3	9
7	Kurang lengkapnya data pendukung	RSO.26.37.99.07	3	3	9
8	Gangguan aplikasi keuangan (SIPD)	RSO.26.37.99.08	5	4	20
9	Keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan	RSO.26.37.99.09	4	2	8
10	Spesifikasi kebutuhan barang tidak sesuai dengan kebutuhan OPD	RSO.26.99.99.10	4	3	12
11	Keterlambatan proses pengadaan barang	RSO.26.99.99.11	4	3	12
12	Kualitas barang tidak sesuai spesifikasi kontrak	RSO.26.99.99.12	3	3	9

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dngan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 3a dan 3b

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 3a dan 3b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rataa-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta disk

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Pemerintah Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah : 2025 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Petanahan : Urusan Kewilayahan					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	
a	b	c	d	e	f	g	
I Risiko Strategis							
1	Layanan publik berbasis IT tidak berjalan optimal	RSP.26.35.19.03	15	Kepala Daerah	Infrastruktur TI belum memadai, SDM tidak kompeten, dan rendahnya integrasi sistem antar unit	Menurunnya kualitas pelayanan publik, keluhan masyarakat meningkat, dan penurunan nilai Indeks Pelayanan Publik	
II Risiko Strategis Perangkat Daerah: Kecamatan Petanahan							
1	Gangguan atau kerusakan peralatan IT (komputer, jaringan internet)	RSO.26.16.19.03	12	Kecamatan Petanahan /IT Support	Infrastruktur TI tidak memadai, jaringan internet tidak stabil	Pelayanan terhenti sementara, antrian menumpuk, keluhan meningkat	
III Risiko Operasional Perangkat Daerah: Kecamatan Petanahan							
1	Dokumen perencanaan terlambat disusun sehingga tidak sesuai dengan jadwal perencanaan daerah	RSO.26.36.99.01	12	Kepala OPD, Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Pengumpulan data lama, koordinasi antarpihak tidak efektif	Keterlambatan penetapan perencanaan realisasi anggaran, menurunnya kualitas dokumen perencanaan	
2	Pelaksanaan evaluasi belum optimal	RSO.26.36.99.03	12	Kepala OPD, Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Kurangnya bukti dukung evaluasi	Keputusan tindak lanjut menjadi tidak tepat	
3	Perubahan regulasi perencanaan/evaluasi yang tiba-tiba sehingga mempengaruhi kesesuaian dokumen	RSO.26.36.99.05	16	Kepala OPD, Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Regulasi, baik nasional/daerah berubah mendadak	Revisi dokumen, potensi keterlambatan perencanaan/evaluasi	

4	Gangguan aplikasi keuangan (SIPD)	RSO.26.37.99.08	20	Bendahara, perencana	Gangguan server, jaringan internet tidak stabil	Administrasi keuangan tertunda, proses perencanaan dan penatausahaan terhambat
5	Spesifikasi kebutuhan barang tidak sesuai dengan kebutuhan OPD	RSO.26.99.99.10	12	PPTK, Pejabat Pengadaan	Analisis kebutuhan kurang tepat, koordinasi kurang	Barang tidak dapat dimanfaatkan optimal, pemborosan anggaran
6	Keterlambatan proses pengadaan barang	RSO.26.99.99.11	12	PPTK / Pelaksanaan Kegiatan	Proses tender lambat, penyedia tidak disiplin	Barang tidak tersedia tepat waktu, menghambat operasional OPD

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan risiko prioritas
- Kolom c diisi dengan kode risiko
- Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai lampiran 7)
- Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b
- Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b
- Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

Nama Pemda Tahun Penilaian		: Pemerintah Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah					
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Petanahan					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Kewilayahan					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis						
1	Layanan publik berbasis IT tidak berjalan optimal	RSP.26.35.1 9.03	Penggunaan aplikasi layanan dasar berbasis IT, Operator layanan IT tersedia, Koordinasi dengan Dinas terkait	SDM belum dilatih rutin, sarana prasarana belum memadai	Penguatan koordinasi dengan Diskominfo, Pelatihan teknis operator	Kepala Daerah	Triwulan III
II	Risiko Strategis Perangkat Daerah: Kecamatan Petanahan						
1	Gangguan atau kerusakan peralatan IT (komputer, jaringan internet)	RSO.26.16. 19.03	Pemeliharaan perangkat berkala, Penggantian perangkat rusak berat	Pemeliharaan belum terjadwal, Tidak ada monitoring perangkat, Tidak ada perangkat cadangan	Menyediakan anggaran pemeliharaan alat	Kecamatan Petanahan / IT Support	Triwulan II
III	Risiko Operasional Perangkat Daerah: Kecamatan Petanahan						
1	Dokumen perencanaan terlambat disusun sehingga tidak sesuai dengan jadwal perencanaan daerah	RSO.26.36. 99.01	Penyusunan sesuai siklus daerah, Rapat koordinasi awal tahun	Koordinasi kurang optimal	Monitoring mingguan dokumen	Kepala OPD, Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Triwulan II
2	Pelaksanaan evaluasi belum optimal	RSO.26.36. 99.03	Evaluasi berkala	Bukti dukung evaluasi kurang lengkap	Membuat indikator evaluasi terukur dan ceklis bukti dukung	Kepala OPD, Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Triwulan II
3	Perubahan regulasi perencanaan/ evaluasi yang tiba-tiba sehingga mempengaruhi kesesuaian dokumen	RSO.26.36. 99.05	Koordinasi dengan dinas terkait	SDM belum mengikuti bintek terbaru	Pemantauan berkala regulasi	Kepala OPD, Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2026

4	Gangguan aplikasi keuangan (SIPD)	RSO.26.37.99.08	Ada admin SIPD	Gangguan jaringan sering terjadi	Penyelesaian tugas segera saat aplikasi lancar, membuat catatan tugas yang terkendala, koordinasi dengan dinas terkait	Bendahara, perencanaan	Tahun 2026
5	Spesifikasi kebutuhan barang tidak sesuai dengan kebutuhan OPD	RSO.26.99.99.10	Penyusunan RKBMID, Koordinasi dengan perencanaan	Analisis kebutuhan kurang maksimal, kurangnya koordinasi dengan pengguna	Melakukan koordinasi kebutuhan	PPTK, Pejabat Pengadaan	Triwulan II
6	Keterlambatan proses pengadaan barang	RSO.26.99.99.11	Beberapa pengadaan belum sesuai jadwal anggaran, Koordinasi dengan penyedia	Penyedia tidak disiplin, beberapa kebutuhan muncul sebelum jadwal anggaran	Pengawasan jadwal pengadaan, koordinasi kebutuhan dengan pengguna	PPTK / Pelaksanaan Kegiatan	Tahun 2026

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi.

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP